



**LAPORAN
KEUANGAN T.A. 2023
AUDITED**

**BALAI BESAR PERIKANAN
BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandar Lampung, Desember 2023
Kepala BBPBL Lampung,



Mulyanto ST, M.Si
NIP. 197406122005021002

DAFTAR ISI
TAR ISI

Kata Pengantar	X
Daftar Isi	X
Pernyataan Tanggung Jawab	X
Ringkasan	X
I. Laporan Realisasi Anggaran	X
II. Neraca	X
III. Laporan Operasional	X
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	X
V. Catatan atas Laporan Keuangan	X
A. Penjelasan Umum	X
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	X
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	X
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	X
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	X
F. Pengungkapan Penting Lainnya	X
VI. Lampiran dan Daftar	X

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan (un-audited) Tahunan TA 2023 Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.533.409.558,- atau mencapai 116 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.325.270.000,-

Realisasi Belanja Negara pada akhir periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.435.259.421,- atau mencapai 99,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp40.565.083.000,- .

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp51.616.117.228,-; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.576.333.390,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp48.514.744.051,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp525.039.787,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp177.366.638,- dan Rp51.438.750.590,- Jadi jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp51.616.117.228,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari Operasi, surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.483.137.436,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp41.184.495.127,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (39.701.357.691,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar (Rp75.388.031,-) dan surplus sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 39,779,287,777)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp52.793.768.090,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp39.779.287.777,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp477.641.587,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp38.901.849.863,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp51.438.750.590,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

Jl. YOS SUDARSO HANURA, PESAWARAN, LAMPUNG
TELEPON 0721 4001379, 4001380 FAXIMILE 0721 4001110

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan (*un-audited*) TA 2023 Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, Desember 2023

Kepala BBPBL Lampung



Mulyanto ST, M.Si
NIP 197406122005021002

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,325,270,000	1,533,409,558	208,139,558	116	1,626,388,000	1,312,549,953	313,838,047	81
1. Pendapatan Sumber Daya Alam								
2. Pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan								
3. Pendapatan BLU								
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,325,270,000	1,533,409,558	208,139,558	116	1,626,388,000	1,312,549,953	313,838,047	81
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,325,270,000	1,533,409,558	208,139,558	116	1,626,388,000	1,312,549,953	313,838,047	81
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat	40,565,083,000	40,435,259,421	(129,823,579)	100	33,446,392,000	32,951,232,655	495,159,345	99
1. Belanja Pegawai	11,076,900,000	11,017,736,004	(59,163,996)	99	13,253,909,000	13,201,687,937	52,221,063	100
2. Belanja Barang	28,431,183,000	28,361,090,417	(70,092,583)	100	16,299,110,000	16,178,105,881	121,004,119	99
3. Belanja Modal	1,057,000,000	1,056,433,000	(567,000)	100	3,893,373,000	3,571,438,837	321,934,163	92
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang								
5. Belanja Subsidi								
6. Belanja Hibah								
7. Belanja Bantuan Sosial								
8. Belanja Lain-lain								
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa								
1. Transfer ke daerah								
a. Dana Perimbangan								
1. Dana Transfer Umum								
1. Dana Bagi Hasil								
b. Dana Alokasi Umum								
2. Dana Transfer Khusus								
a. Dana Alokasi Khusus fisik								
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik								
b. Dana Insentif Daerah								
c. Dana Keistimewaan DIY								
d. Dana Otonomi Khusus								
2. Dana Desa								
3. Hibah Kepala Daerah								
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	40,565,083,000	40,435,259,421	(129,823,579)	100	33,446,392,000	32,951,232,655	459,159,345	99
C. PEMBIAYAAN								

**BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT
LAMPUNG
NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PNB	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	2,576,333,390	1,929,688,308
Jumlah Aset Lancar		2,576,333,390	1,929,688,308
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	11,050,462,500	11,050,462,500
Peralatan dan Mesin	C.15	70,968,242,932	68,963,696,632
Gedung dan Bangunan	C.16	32,144,415,231	34,694,441,087
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	3,357,755,872	3,357,755,872
Aset Tetap Lainnya	C.18	107,366,000	107,366,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	67,166,150	140,986,150
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(69,180,664,634)	(67,876,333,628)
Jumlah Aset Tetap		48,514,744,051	50,438,374,613
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	2,867,453,680	3,424,193,930
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(2,342,413,893)	(2,871,270,837)
Jumlah Aset Lainnya		525,039,787	552,923,093
JUMLAH ASET		51,616,117,228	52,920,986,014
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	177,366,638	127,217,924
Utang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		177,366,638	127,217,924
JUMLAH KEWAJIBAN		177,366,638	127,217,924
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	51,438,750,590	52,793,768,090
JUMLAH EKUITAS		51,438,750,590	52,793,768,090
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		51,616,117,228	52,920,986,014

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1,483,137,436	1,271,578,743
UMLAH PENDAPATAN		1,483,137,436	1,271,578,743
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11,037,560,004	13,201,687,937
Beban Persediaan	D.3	2,619,438,825	6,022,170,279
Beban Barang dan Jasa	D.4	6,571,050,668	6,060,871,803
Beban Pemeliharaan	D.5	2,077,656,342	1,108,244,950
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,932,079,697	1,093,922,509
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	14,500,167,024	5,997,273,480
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2,446,480,566	6,500,293,503
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
UMLAH BEBAN		41,184,433,126	39,984,464,461
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(39,701,295,690)	(38,712,885,718)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		40,756,178	26,737,212
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		19,634,207,883	11,327,883,250
Defisit Selisih Kurs		(19,593,451,705)	(11,301,146,038)
Pendapatan dari Keg Non Operasional Lainnya		19,885,617,018	14,247,144,098
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL		-	-
Penerimaan kembali belanja barang TAYL		-	-
Pendapatan perolehan aset lainnya		-	-
Pendapatan penyelesaian Nilai persediaan		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		370,157,400	-
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(77,992,087)	2,945,998,060
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(39,779,287,777)	(35,766,887,658)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(39,779,287,777)	(35,766,887,658)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	52,793,768,090	75,223,645,535
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-39,779,287,777	(35,766,887,658)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(477,641,587)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
Transfer Masuk	E.3.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.7	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.8	(477,641,587)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	38,901,849,863	13,337,010,213
EKUITAS AKHIR	E.5	51,438,750,590	52,793,768,090

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum Entitas
dan Rencana
Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi Bogor

Kantor Akuntansi Bogor didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor.

Kantor Akuntansi Bogor mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Akuntansi Bogor berkomitmen dengan misi **"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Akuntansi Bogor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Akuntansi Bogor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Akuntansi Bogor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Akuntansi Bogor. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Bogor adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan

fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain

karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Tetap

Aset **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Panjang

Jangka

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun

Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Jumlah pegawai Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 142 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 73 orang, 2 Orang PPPK, Tenaga Kontrak (PPNPM) sebanyak 44 orang, dan tenaga harian lepas sebanyak 23 orang.
2. Selama periode berjalan, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu :
 - Revisi I yaitu pada tanggal 24 Desember 2022 yaitu revisi POK dengan nilai pagu yang masih sama dengan pagu anggaran awal ;
 - Revisi II (kedua) yaitu tanggal 10 Februari 2023 dengan anggaran yang masih sama dengan revisi sebelumnya ;
 - Revisi ke III (ketiga) yaitu tanggal 17 April 2023 dengan anggaran yang masih sama dengan revisi sebelumnya ,
 - Revisi ke IV (keempat) yaitu tanggal 18 Juli 2023 yaitu revisi DIPA dengan nilai pagu yang mengalami perubahan menjadi Rp36.936.807.000 ;
 - Revisi ke V (kelima) tanggal 28 Juli 2023 yaitu revisi POK dengan nilai pagu sama dengan revisi ke IV ;
 - Revisi ke VI (keenam) yaitu revisi dari Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 06 Agustus 2023 dengan nilai Pagu menjadi Rp46.596.807.000,-
 - Revisi ke VII (ketujuh) yaitu Revisi DIPA dari Kanwil tanggal 29 September 2023
 - Revisi ke VIII (kedelapan) yaitu revisi dari Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 10 Oktober 2023 dengan nilai pagu anggaran menjadi Rp45.756.807.000,-
 - Revisi ke IX (kesembilan) yaitu revisi POK dari Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 11 Oktober 2023 dengan nilai pagu masih sama dengan revisi sebelumnya.
 - Revisi ke X (kesepuluh) yaitu revisi pagu dari Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 18 Oktober 2023 dengan nilai pagu Rp40.565.083.000,-
 - Revisi ke XI (kesebelas) yaitu revisi POK dari Direktorat Jenderal Anggaran Tanggal 30 November 2023 dengan nilai pagu anggaran masih sama dengan pagu sebelumnya.

3. Pagu anggaran yang terdiri dari pagu yang berasal dari Rupiah Murni (RM) senilai Rp 39.528.690.000,- dan pagu yang berasal dari PNP sebesar Rp1.036.393.000,-

Rincian anggaran pada periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pend Penjualan Hasil Perikanan	1,325,270,000	1,325,270,000
Jumlah Pendapatan	1,325,270,000	1,325,270,000
Belanja		
Belanja Pegawai	12,634,700,000	11,076,900,000
Belanja Barang	21,957,007,000	28,431,183,000
Belanja Modal	4,537,000,000	1,057,000,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	39,128,707,000	40,565,083,000

*Realisasi
Pendapatan
Rp1.533.409.558,-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.533.409.558,- atau mencapai 116 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.325.270.000. Pendapatan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung terdiri dari sbb:

- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (MAP 425112)
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (MAP 425131)
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi (MAP 425151)
- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya (MAP 425289)
- Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129)
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TYL (425911)
- Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913)

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pend Penj Hsl Perternakan & Budidaya	1,027,155,000	1,121,415,800	109.18
Pend.Pemindahtanganan BMN		40,756,178	
Pend Sewa Tanah Gdg & Bangunan	-	48,562,636	-
Pend Pengg Sarana & Prasarana Tusi	162,800,000	157,100,000	96.50
Pend Pengujian, Sertifikasi & Stand	135,315,000	156,059,000	115.33
Penerimaan Kemb B barang TAYL		-	-
Pengembnalian belanja modal TAYL	-	2,604,056	-
Penerimaan Kemb B Pegawai TAYL	-	6,911,888	-
Jumlah	1,325,270,000	1,533,409,558	115.71

Realisasi Pendapatan dari Penjualan Hasil Perikanan periode 31 Desember TA 2023 mengalami kenaikan sebesar persen dibandingkan periode yang sama TA 2022.

1. Pendapatan penjualan hasil peternakan, perikanan mengalami kenaikan sebesar 15,43 persen dibandingkan TA 2022 dikarenakan hasil penjualan perikanan yang mengalami peningkatan di sektor penjualan benih ikan.
2. Pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan juga mengalami penurunan sebesar -6,61 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya beberapa pegawai yang sudah tidak menempati rumah dinas lagi dikarenakan beberapa pegawai sudah pindah.
3. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana Tusi mengalami penurunan sebesar 1,13 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun ini tidak banyak anak PKL yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di BBPBL Lampung.
4. Pendapatan pengujian sertifikasi dan stadarisasi mengalami kenaikan sebesar 74,95 % , hal ini dikarenakan adanya pertambahan kenaikan jumlah sampel yang masuk.

Laporan Keuangan Tahunan (un-audited) Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung TA 2023

5. Terdapat pendapatan pemindahtanganan BMN senilai Rp40.756.178,- yaitu berupa jaringan distribusi tegangan 1 s.d 20 KVA yang berupa instalasi genset.
6. Pada periode 31 Desember 2023 terdapat penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp6.911.888,- Penerimaan tersebut berasal dari pengembalian uang makan , tukin tahun 2022.
7. Terdapat penerimaan kembali belanja modal TAYL senilai Rp2.604.056,- yaitu adalah tindak lanjut audit Kinerja Itjen No.T.326/ITJ/HP.110/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 , berupa pembayaran kelebihan bayar CV.Ciano Nur Niaga) dan sudah dilakukan penyeteroran ke kas negara dengan nomor NTPN 0C3BF3CIFBFIIMD.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pend Penj Hasil Peternakan , pertanian	1,121,415,800	971,475,100	15.43
Pend Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	48,562,636	52,000,643	-6.61
Pend Pengg Sarana & Prasarana Tusi	157,100,000	158,900,000	-1.13
Pend Pengujian, Sertifikasi & Standarisas	156,059,000	89,203,000	74.95
Pend.penjualan peralatan dan mesin	-	5,525,000	-100.00
Pendapatan pemindahtanganan BMN	40,756,178	21,212,212	92.14
Pend.denda keterlambatan		-	
Penerimaan Kemb B Pegawai TAYL	6,911,888	7,743,998	-10.75
Penerimaan Kemb B Barang TAYL		6,490,000	
Penerimaan Kemb B Modal TAYL	2,604,056.00		0.00
Jumlah	1,533,409,558	1,312,549,953	116.83

Realisasi Belanja
Negara
Rp40.435.259.421,-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Satker BBPBL Lampung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.435.259.421,- atau 99,68 % dari anggaran belanja sebesar Rp 40.565.083.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Semester II TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	11.076.900.000	11.018.936.004	99.48
Belanja Barang	28.431.183.000	28.361.090.417	100.00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Belanja Modal	1.057.000.000	1.056.433.000	100.00
Total Belanja Kotor	40.565.083.000	40.436.459.421	99,68
Pengembalian Belanja	0	1.200.0000	
JUMLAH	45.756.807.000	40.435.259.421	99,68

Realisasi Belanja Semester II TA 2023 mengalami penurunan sebesar 23,77 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA. 2023. Hal ini dikarenakan karena pada tahun ini BBPBL Lampung mengalami adjustment anggaran yang berpengaruh pada penyerapan realisasi anggaran dan kenaikan pagu anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	11,017,736,004	13,154,945,937	(16.25)
Belanja Barang	28,361,090,417	16,169,836,881	75.40
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal	1,056,433,000	3,571,483,837	(70.42)
Jumlah	40,435,259,421	32,896,266,655	22.92

Belanja Pegawai
Rp11.017.736.004,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.017.736.004,- dan Rp13.154.945.937,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Laporan Keuangan Tahunan (un-audited) Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung TA 2023

Realisasi belanja Pegawai Semester II TA 2023 mengalami penurunan sebesar 16,54 persen dari TA 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11,018,936,004	13,233,944,938	(16.74)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Vakasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	11,018,936,004	13,233,944,938	(16.74)
Pengembalian Belanja Pegawai	1,200,000	32,257,001	-
Jumlah Belanja	11,017,736,004	13,201,687,937	(16.54)

Belanja Barang

Rp28.361.090.417,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp28.361.090.417,- dan Rp16.178.105.881,-. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 75,31 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2,614,163,030	2,162,456,910	20.89
Belanja Barang Non Operasional	1,685,409,088	1,818,923,618	(7.34)
Belanja Barang Persediaan	5,227,585,000	5,060,884,549	3.29
Belanja Jasa	2,241,153,836	2,102,984,465	6.57
Belanja Pemeliharaan	2,257,817,112	1,108,244,950	103.73
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,932,079,697	1,093,922,509	76.62
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	12,152,682,194	2,206,423,980	-
Bel Barang Lainnya untuk diserahkan kpd Masy.	250,200,460	624,264,900	-
Jumlah Belanja Kotor	28,361,090,417	16,178,105,881	75.31
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	28,361,090,417	16,178,105,881	75.31

Belanja Modal
Rp1.056.433.000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.056.433.000,- dan Rp.571.438.837,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester II TA 2023 mengalami penurunan sebesar 70,42 persen dibandingkan Semester II TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Pengurukan dan pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,056,433,000	1,464,627,448	(27.87)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan	0	1,907,930,821	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja penambahan nilai Jalan dan Jembatan	0	198,880,568	
Belanja Modal perencanaan gedung dan bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	1,056,433,000	3,571,438,837	-70.42

Belanja Modal Tanah
Rp0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Semester II TA 2023 sebesar Rp0,- dan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp1.056.433.000,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.056.433.000,-, mengalami penurunan sebesar 0,57 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2022 sebesar Rp1.464.627.448,- hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran belanja modal tahun yang lalu.

Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 berupa peralatan penunjang laboratorium, alat-alat penunjang produksi perikanan berupa pompa air, dan peralatan penunjang perkantoran lainnya seperti, CCTV, LCD Projector, Mesin Antrian, dan AC Split.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	1,056,433,000	1,464,627,448	0.72
			0.00
Jumlah Belanja Kotor	1,056,433,000	1,464,627,448	0.72
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1,056,433,000	1,464,627,448	0.72

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp1.907.930.821,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Semester II TA 2023 mengalami penurunan sebesar -100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2022, hal ini disebabkan karena belum adanya realisasi pada belanja modal Gedung dan bangunan pada Semester II tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	0	1,907,930,821	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	0	1,907,930,821	-100.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	1,907,930,821	-100.00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,- dan Rp0,- Tidak ada realisasi Belanja Modal Jalan , Irigasi, dan Jaringan pada Semester II TA 2023 ini..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	THN 2023	THN 2022	Naik (Turun)
Bel Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal
Lainnya
Rp,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30,- dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang tunai di brankas	-	-
Uang di rekening bank	-	-
Jumlah Kas	-	-
Saldo akhir BP Kas	-	-
Jumlah Kas	-	-
Selisih Kas	-	-
Saldo UP	-	-
Kwitansi UP	-	-
Jumlah UP	-	-
Saldo UP menurut UAKPA	-	-
Selisih pembukuan UP	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak
Rp3.028.790,-

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar TPA
Rp 0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-	-	#VALUE!
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-	-	#VALUE!
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-	-	#VALUE!
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		#VALUE!

Belanja Dibayar di Muka
Rp 0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan pada akhir periode per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.576.333.390,- dan Rp1.929.688.308,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Persediaan	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	1,347,831,186	332,799,000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Hewan & Tanaman dijual/diserahkan kpd masy	693,821,550	569,668,000
aset lain-lain untuk diserahkan kpd masyarakat	-	-
Brg Persed Lainnya u/ dijual/disrhkan kpd masy/Pemda	186,100,130	615,075,900
Bahan Baku	68,665,842	349,674,623
Persediaan Lainnya	279,914,682	62,470,785
Jumlah	2,576,333,390	1,929,688,308

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Penjelasan terkait rincian barang persediaan per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Barang konsumsi senilai Rp1.347.831.186,- berupa alat kantor lainnya dan pakan mandiri.
2. Hewan dan tanaman dijual / diserahkan kepada masyarakat senilai Rp693.821.550,- berupa ikan / benih ikan yang disalurkan untuk masyarakat dalam program bioflok.
3. Barang persediaan lainnya untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat senilai Rp186.100.130,- berupa pakan buatan mandiri.
4. Bahan baku senilai Rp68.665.842,- berupa bahan baku pakan dan obat-obatan.
5. Persediaan Lainnya senilai Rp279.914.682,- berupa obat-obatan laboratorium Perikanan.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

TPA
Rp 0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-	-	#VALUE!
Tagihan PA			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-	-	#VALUE!
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	#VALUE!

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.050.462.500,- dan Rp11.050.462.500. Tidak ada mutasi nilai tanah pada periode semester II Tahun 2023. Rincian mutasi tanah dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	11,050,462,500
Mutasi tambah:	
Pengurukan dan pematangan tanah	0
belanja modal tanah pembentuk fisik berupa pagar semi permanen	0
Mutasi kurang:	
KDP	0
Saldo per 31 Desember 2023	11,050,462,500

Penambahan nilai aset tanah tersebut berasal dari pengurukan dan pematangan tanah tambak untuk kegiatan Budidaya udang system Cluster atau dikenal dengan nama Milenail Shrimp Farm (MSF) yang berlokasi di Kawasan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan mobilisasi dan kegiatan keselamatan kerja , untuk kegiatan pekerjaan tanah dan Geosintetik yang merupakan kegiaiatan divisi pekerjaan tanah (timbunan dan galian tanah). Berdasarkan survei lapangan maka untuk perhitungan luasnya tanah galian yaitu pekerjaan tambah timbunan biasa dari sumber galian , timbunan biasa dari dari sumber galian volume awal 14,256,00 M3 sehingga volume total menjadi 15,736,00M3.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

1	4.732 m2	Way Muli, Kalianda, Lampung Selatan, Lampung	751,505,000
2	59.000 m2	Jl. Yos Sudarso Hanura, Pesawaran, Lampung	8,947,144,000
3	96 m2	Jl. RE Marta Dinata Hanura, Pesawaran, Lampung	29,717,000
4	15.736.00M3	Jl. Yos Sudarso Hanura, Pesawaran, Lampung	91,082,000
Jumlah			9,819,448,000

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin pada akhir periode per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp70.968.242.932,- dan Rp68.963.696.632,-. Mutasi tambah sebesar Rp. 3.603.854.800 dan mutasi

kurang sebesar Rp. 1.599.308.500

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengadaan alat laboratorium umum lainnya sebanyak 1 unit senilai Rp11.433.000,- dengan nomor kontrak kwitansi 00012 tanggal 23 Februari 2023 dengan rekanan CV Anugerah Mandiri, yang terletak di Pokja Keskanling.
2. Pengadaan Freezer merk AQUA sebanyak 1 unit senilai Rp11.500.000,- dengan nomor kontrak 541/PPK/BBPBL/PL.424/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dengan rekanan CV SALAK RAYA SEJAHTERA, freezer tersebut berada di Pokja Modul I
3. Pengadaan AC Split 1 PK sebanyak 2 unit senilai Rp11.800.000,- @Rp5.900.000,- dengan nomor kontrak 793/PPK/BBPBL/PL.424/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan rekanan Mitra Solusi Langgeng Jaya, dan berada di Modul Phytoplankton.
4. Pengadaan AC Split 2 PK sebanyak 2 unit senilai Rp17.900.000,- @Rp8.950.000,- dengan nomor kontrak 1331/PPK/BBPBL/PL.424/IV/2023 tanggal 13 Mei 2023 dengan rekanan Mitra Solusi Langgengjaya , barang tersebut berada di Pokja Pelayanan Publik.
5. Pengadaan Dispenser sebanyak 1 unit senilai Rp3.400.000,- dengan nomor kontrak 1333/PPK/BBPBL/PL.424/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 dengan rekanan Mitra Solusi Langgeng Jaya.
6. Pengadaan CCTV Kamera sebanyak 1 unit senilai Rp4.400.000,- dengan nomor kontrak 1421/PPK/BBPBL/PL.424/2023 tanggal 22 Mei 2023 dengan rekanan CV Adrenaline Tech Inovatif, barang tersebut berada di ruang pelayanan public
7. Pengadaan Digital LED sebanyak 1 unit senilai Rp4.900.000,- dengan nomor kontrak 1422/PPK/BBPBL/PL.424/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dengan rekanan CV Adrenaline Tech Inovatif
8. Pengadaan Mesin Antrian sebanyak 1 unit senilai Rp27.650.000,- dengan nomor kontrak 1423/PPK/BBPBL/PL.424/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dengan rekanan CV Adrenaline Tech Inovatif

-
9. Pengadaan LCD Proyektor merk ACER sebanyak 1 unit senilai Rp6.900.000,- dengan nomor kontrak 1470/PPK/BBPBL/PL.424/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dengan rekanan Mitra Solusi Langgeng Jaya.
 10. Pengadaan AC Split merk Panasonic 1 PK sebanyak 4 unit senilai Rp23.600.000,- @Rp5.900.000,- dengan nomor kontrak 1471/PPK/BBPBL/PL.424/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 .
 11. Pengadaan alat laboratorium lainnya berupa Autoclave sebanyak 1 unit senilai Rp40.500.000,- dengan nomor kontrak 1671/PPK/BBPBL/PL.424/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan rekanan CV Wipi Pratama.
 12. Pengadaan Pompa air sebanyak 3 unit senilai Rp130.500.000,- @Rp43.500.000,- dengan merk Ebara Brownze SPQPB 100 4 Inch dengan nomor kontrak 511/PPK/BBPBL/PL.424/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 , dengan supplier CV Kusuma Berkah
 13. Pengadaan pompa air merk Ebara Brownze SQPB 100 4 inch sebanyak 2 unit senilai Rp87.000.000,- @Rp43.500.000,- dengan rekanan CV Kusuma Berkah
 14. Pengadaan Luminar Air Flow type HLM 2000 sebanyak 1 unit senilai Rp98.500.000,- dengan nomor kontrak 563/PPK/BBPBL/PL.424/III/2023 tanggal 25 Februari 2023.
 15. Pembelian spare part mesin pakan senilai Rp133.200.000,- dengan nomor kontrak 2562/PPK/BBPBL/PL.42 4/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dengan rekanan PT.Timur Mandiri Aquakultur.
 16. Pengadaan 1 unit mesin pakan senilai Rp200.000.000,- dengan nomor kontrak 2673/PPK/BBPBL/PL.42 4/IX/2023 tanggal 22 September 2023 dengan rekanan CV.Mega Daya Engineering.

17. Pengadaan pembelian alat angkut pakan berupa mobil pick up merk Suzuki sebanyak 1 unit senilai Rp162.000.000,- tanggal 09 Oktober 2023 dengan rekanan CV.Persada Lampung Raya.

Mutasi transaksi terhadap peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	68,963,696,632
Mutasi tambah:	
Pembelian	1,056,433,000
Trasfer Masuk	0
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2,547,421,800
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	1,599,308,500
Transfer keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	70,968,242,932
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(61,206,023,028)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	9,762,219,904

Gedung dan Bangunan
Rp32.144.415.231,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp32.144.415.231,- dan Rp34.694.441.087,- terdapat mutasi kurang pada periode Semester II tahun ini, mutasi kurang tersebut berasal dari reklasifikasi keluar berupa bangunan mercusuar yang terletak di Pangandaran dan koreksi asset tetap berupa kekurangan volume pekerjaan teaser pintu (Gedung bangunan) di ruang pelayanan publik.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	34,694,441,087
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan melalui KDP	-
Penyelesaian pembangunan Langsung (pagar semi permanen)	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	2,547,421,800
Koreksi perubahan (kekurangan volume)	2,604,056
Saldo per 31 Desember 2023	32,144,415,231
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-6,568,157,874
Nilai Buku per 31 Desember 2023	25,576,257,357

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp3.357.755.872,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.357.755.872,- dan Rp3.357.755.872,-. Tidak ada penambahan nilai Jalan, Irigasi, Jembatan dan jaringan sampai dengan Semester II tahun ini.

Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	3,357,755,872
Mutasi tambah:	
Pengembangan nilai aset	-
Penyelesaian pembangunan dengan KDP	-
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	3,357,755,872
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1,406,483,732.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1,951,272,140

Aset Tetap Lainnya
Rp107.366.000,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah Rp107.366.000 dan Rp107.366.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode Semester II Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	107,366,000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	107,366,000
-	0
Nilai Buku per 3 Desember 2023	107,366,000

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp67.166.150,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp67.166.150,- dan Rp140.986.150,-. Terdapat kenaikan nilai konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp73.820.000,-Kontruksi dalam pengerjaan tersebut berupa :

1. Pengadaan perencanaan rehab auditorium (aula) sebanyak 1 paket (2345.RBQ.004.052.A.533121) senilai Rp25.543.325,- dengan rekanan CV PANCA PERSADA dengan nomor kontrak 667/PPK/BBPBL/PL.424.III/2022 tanggal 07 Maret 2022.
2. Pengadaan perencanaan rehab Hatchery modul I sebanyak 1 paket (2345.RBQ.004.052.A.533121) senilai Rp25.763.325,- dengan rekanan CV.R'LIMA KONSULTANT dengan nomor kontrak 672/PPK/BBPBL/PL.424/III/2022 tanggal 08 Maret 2022.
3. Pengadaan perencanaan pagar komplek 1 paket (2345.RBQ.004.052.A.533121) senilai Rp15.859.500,- dengan rekanan CV.PANCA PERSADA dengan nomor kontrak 692/PPK/BBPBL/PL.424/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.

Kontruksi Dalam Pengerjaan tersebut akan mau di ajukan dalam usulan penghapusan dikarenakan anggaran yang tidak tersedia.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp69.180.664.634)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp69.180.664.634,-) dan (Rp67.876.333.628,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	70,968,242,932	61,206,023,028	9,762,219,904
2	Gedung dan Bangunan	32,144,415,231	6,568,157,874	25,576,257,357
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,357,755,872	1,406,483,732	3,791,427,029
4	Aset tetap yang tidak digunakan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		106,470,414,035	69,180,664,634	37,289,749,401

Aset Tak Berwujud
Rp 0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain
Rp2.867.453.680,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.867.453.680,- dan Rp3.424.193.930,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung telah mengajukan Penetapan Status Aset ke Unit Eselon I sebagai syarat usulan penghapusan aset yang dihentikan dari penggunaannya. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	3,424,193,930
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	556,740,250
Saldo per 31 Desember 2023	2,867,453,680
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(3,277,671,493)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	(410,217,813)

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan adalah dari hasil penghentian penggunaan BMN yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp11.856.900,- berupa 4 buah Printer (Peralatan Personal Komputer).
- Penambahan dari hasil penghentian penggunaan BMN yaitu berupa 32 unit AC split senilai Rp133.238.000,-
- Penambahan penghentian penggunaan BMN berupa 10 unit portable water pump senilai Rp89.675.000,-
- Penambahan dari penghentian penggunaan BMN berupa Pressure sterilizer sebanyak 1 unit senilai Rp150.535.000,-
- Crawler Excavator dan attachment senilai 1.127.843.750,-
- Keramba Jaring Apung sebanyak 14 buah senilai Rp193.944.250,-
- Jaring angkat lainnya sebanyak 39 buah senilai Rp101.500.000,-
- Kendaraan mini bus (penumpang 14 orang ke bawah) sebanyak 4 unit senilai Rp459.191.928,-
- Bechhoe Loader sebanyak 1 unit senilai Rp1.127.843.750,-
- 3 buah Laptop senilai Rp35.616.400,-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp2.342.413.893,-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp2.342.413.893,- dan Rp2.871.270.837,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	5,104,404,958	4,499,049,764	605,355,194
Jumlah	5,104,404,958	4,499,049,764	605,355,194

Amortasi Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa Nihil.

Uang Muka dari KPPN
Rp0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp177.366.638,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp177.366.638,- dan Rp127.217.924,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Semester II TA 2023 ini Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung memiliki 2 rincian utang kepada pihak ketiga yaitu tagihan listrik PLN bulan Desember 2023 sebesar Rp157.542.638- dan belanja pegawai yang masih harus di bayar berupa uang makan pegawai bulan Desember 2023 (untuk 9 hari) sebesar Rp19.824.000,- Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada pihak ketiga	157,542,638	Tagihan listrik PLN bulan Desember 2023
Utang kepada pihak ketiga	19,824,000	Uang Makan pegawai (9 hari) bulan Desember 2023

Pendapatan Diterima di Muka
Rp 0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Beban yang Masih Harus Dibayar
Rp177.366.638,-

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp177.366.638,- dan Rp127.217.924,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Utang kepada Pihak Ketiga	177,366,638	127,217,924
Jumlah	177,366,638	127,217,924

Ekuitas
Rp51.438.750.590,-

C.26 Ekuitas

Ekuitas pada akhir periode per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp51.438.750.590,- dan Rp52.793.768.090,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp1.483.137.436,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp1.483.137.436,- dan Rp1.271.578.743,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember
2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pend Penj Hasil Peternakan & Budidaya	1,121,415,800	971,475,100	15.43
Pend Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	48,562,636	52,000,643	-6.61
Pend Pengg Sarana & Prasarana Tusi	157,100,000	158,900,000	-1.13
Pend Pengujian, Sertifikasi & Standarisasi	156,059,000	89,203,000	74.95
Jumlah	1,483,137,436	1,271,578,743	16.64

Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya merupakan Pendapan-LO yang diperoleh dari produksi benih dan hasil budidaya. Adapun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari hasil sewa rumah dinas. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi merupakan Pendapan-LO yang diperoleh dari sewa asrama/guest house. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari jasa kegiatan di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Kenaikan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak disebabkan adanya kenaikan pada pendapatan penjualan peikanan, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana Tusi, kenaikan jumlah dalam pendapatan pengujian, sertifikasi serta adanya pendapatan dari denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.

Beban Pegawai
Rp11.017.736.004,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.017.736.004,- dan Rp13,201,687,937,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	4,001,962,460	4,722,285,640	(15.25)
Pengembalian beban Pembulatan Gaji PNS	0	(1,191)	(100.00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	49,740	64,221	
Beban Tunjangan Suami/Isteri PNS	337,873,956	397,594,684	(15.02)
Beban Tunjangan Anak PNS	97,437,228	115,227,156	(15.44)
Pengembalian beban Tunj.Struktural PNS	0	(15,680,000)	
Beban Tunjangan Struktural PNS	66,910,000	60,300,000	10.96
Beban Tunjangan Fungsional PNS	297,730,000	548,560,000	(45.73)
Pengembalian beban Tunj.Fungsional PNS	0	(10,330,000)	(100.00)
Beban Tunjangan PPh PNS	19,299,023	30,784,324	(37.31)
Beban Tunjangan Beras PNS	236,016,780	276,861,660	(14.75)
Beban Tunjangan Uang Makan PNS	551,325,000	718,271,000	(23.24)
Beban Gaji pokok PPPK	14,832,500	0	#DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PPPK	280	0	#DIV/0!
Beban Gaji tunjangan Fungsional PPPK	2,700,000	0	#DIV/0!
Beban uang makan PPPK	3,367,000	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan beras PPPK	362,100	0	#DIV/0!
Beban Uang Lembur	68,086,000	64,218,000	6.02
Beban Tunjangan Umum PNS	56,720,000	53,605,000	5.81
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	5,241,058,429	6,246,173,253	(16.09)
Pengembalian beban tunjangan fungsional pegawai	0	(6,245,810)	(100.00)
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan) PPPK	23,205,508		
Pengembalian beban tunjangan fungsional pegawai	-1,200,000		#DIV/0!
Jumlah	11,017,736,004	13,201,687,937	(16.54)

Beban Persediaan
Rp2.619.438.825,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.619.438.825,- dan Rp6,022,170,279,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester II Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1,508,064,777	3,756,838,007	#REF!
Beban Persediaan Bahan Baku	893,571,643	2,034,139,857	#REF!
Beban Persediaan Lainnya	217,802,405	231,192,415	#REF!
Jumlah Beban Persediaan	2,619,438,825	6,022,170,279	(56.50)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp6.571.050.668,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.571.050.668,- dan Rp6.060.871.803,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2,427,713,130	2,005,593,210	#REF!
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	86,385,000	71,922,000	#REF!
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	1,472,900	8,441,700	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	98,592,000	76,500,000	#REF!
Beban Bahan	655,945,512	309,706,680	#REF!
Beban Honor Output Kegiatan	612,960,000	645,170,000	#REF!
Beban Barang Non Operasional Lainnya	416,503,576	864,046,938	#REF!
Beban Langganan Listrik	1,885,244,588	1,952,562,307	#REF!
Beban Langganan Telepon	44,312,394	49,366,464	#REF!
Beban Langganan Air	0	20,134,800	#REF!
Beban langganan daya dan jasa lainnya	18,237,268	12,292,704	0.00
Beban Sewa	97,119,500	34,600,000	
Beban Jasa Profesi	40,500,000	9,600,000	#REF!
Beban Jasa Lainnya	186,064,800	0	#REF!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan & Mesin		935,000	2,970,000
Jumlah	6,571,050,668	6,060,871,803	8.42

Beban
Pemeliharaan
Rp2.077.656.342,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.077.656.342,- dan Rp1,108,244,950,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	840,300,680	226,834,764	270.45
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	820,189,903	857,469,186	-4.35
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,999,103	23,941,000	133.01
Beban pemeliharaan jalan dan jembatan	199,300,056	0	
Beban Pemeliharaan Jaringan	199,866,600	0	0.00
Beban persediaan suku cadang			
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	2,077,656,342	1,108,244,950	87.47

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.932.079.697,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.932.079.697,- dan Rp1,093,922,509,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,683,819,697	1,031,947,509	63.17
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,750,000	16,975,000	34.02
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	175,510,000	0	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	50,000,000	45,000,000	11.11
Jumlah	1,932,079,697	1,093,922,509	76.62

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp14.500.167.024,
-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.500.167.024,- dan, Rp5.997.273.480,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember
2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1,687,110,500	2,421,587,000	0.00
Beban persediaan aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	0	1,681,700,000	
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	12,813,056,524	1,893,986,480	0.00
Jumlah	14,500,167,024	5,997,273,480	141.78

Beban Bantuan
Sosial
Rp 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat beban sosial pada Satker BBPBL Lampung.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.446.480.566,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Semester II /Tahunan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.446.480.566,- dan Rp6.500.293.503,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember
2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,732,465,269	4,894,276,459	#REF!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	597,078,409	1,343,605,886	#REF!
Beban Penyusutan Jalan dan jembatan	20,502,090	31,060,153	#REF!
Beban Penyusutan Irigasi	21,896,746	47,952,770	#REF!
Beban Penyusutan jaringan	24,117,406	70,842,722	#REF!
Beban Penyusutan Aset Tetap Yg tidak digunakan dalam pemerintahan	50,420,646	112,555,513	0.00
Jumlah Penyusutan	2,446,480,566	6,500,293,503	-62.36

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode Semester II tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan piutang PNB	0	0	#DIV/0!
Jumlah	-	-	-

Beban Lain-lain Rp 0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp.39.779.287.777,-)

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian kegiatan non operasional Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	40,756,178	26,737,212	52.43
Beban pelepasan aset non lancar	19,634,207,883	11,327,883,250	73.33
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	19,885,617,018	14,247,144,098	39.58
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	370,157,400	0	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Surplus/defisit dari kegiatan lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0	0	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	
Surplus defisit pelepasan dari kegiatan non oper	(77,992,087)	(35,766,887,658)	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(39,779,287,777)	(35,766,887,658)	11.22

Pos Luar Biasa
Rp0,-

D.13. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Ekuitas Awal
Rp52.793.768.090,-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp52.793.768.090,- dan Rp75.223.645.535,-.

Defisit LO
Rp.(39.779.287.777,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(39.779.287.777,-) dan Rp(35.766.887.658,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode Semester II / Tahunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,- Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

JENIS KOREKSI	NILAI KOREKSI
Asset tetap yang berupa rambu-rambu lalu lintas laut	477.641.587
Jumlah	

Laporan Keuangan Tahunan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung TA 2023

Koreksi atas
reklasifikasi Rp0,-

E.3.2.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi pada akhir periode 31 Desember 2023 sebesar Rp0,- dan untuk akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp0,-.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode Semester II tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp477.579.586,-)

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode per 31 Desember 2023 dan akhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp477.579.586,- dan Rp,-.

Koreksi tersebut berasal dari selisih nilai penyusutan akibat transaksi reklasifikasi /perubahan kodefikasi barang dari Gedung bangunan menjadi peralatan dan mesin (massa manfaat)

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Aset tetap yang berupa rambu-rambu lalu lintas laut	477.579.586
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp(0)

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
-	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38.901.849.863,- dan Rp13.337.010.213,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	40,435,259,421
Diterima Dari Entitas Lain	-1,533,409,558
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Jumlah	38,901,849,863

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode per 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(1.533.409.558,-) sedangkan DKEL sebesar Rp40.435.259.421,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA- BUN. Tidak terdapat Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan

pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

E.

E.7 Ekuitas akhir

Nilai Ekuitas pada akhir periode 31 Desember 2023 dan akhir tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp51.438.750.590,- dan Rp52.793.768.090,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Satuan Kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dalam melaksanakan kegiatan mengacu pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 nomor: SP DIPA-032.04.2.427706/2021 tanggal 30 November 2022. Selama periode per 31 Desember 2023 telah terjadi revisi POK dan DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu :
 - Revisi I yaitu pada tanggal 24 Desember 2022 yaitu revisi POK dengan nilai pagu yang masih sama dengan pagu anggaran awal ;
 - Revisi II (kedua) yaitu tanggal 10 Februari 2023 (revisi POK) dengan anggaran yang masih sama dengan revisi sebelumnya ;
 - Revisi ke III (ketiga) yaitu tanggal 17 April 2023 dengan anggaran yang masih sama dengan revisi sebelumnya.
 - Revisi ke IV (keempat) yaitu tanggal 18 Juli 2023 yaitu revisi DIPA dengan nilai pagu yang mengalami perubahan menjadi Rp36.936.807.000 ;
 - Revisi ke V (kelima) tanggal 28 Juli 2023 yaitu revisi POK dengan nilai pagu sama dengan revisi ke IV ;
 - Revisi ke VI (keenam) yaitu revisi dari Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 06 Agustus 2023 dengan nilai Pagu menjadi Rp46.596.807.000,-
 - Revisi ke VII (ketujuh) yaitu Revisi DIPA dari Kanwil tanggal 29 September 2023
 - Revisi ke VIII (kedelapan) yaitu revisi dari Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 10 Oktober 2023 dengan nilai pagu anggaran menjadi Rp45.756.807.000,-
 - Revisi ke IX (kesembilan) yaitu revisi POK dari Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 11 Oktober 2023 dengan nilai pagu masih sama dengan revisi sebelumnya.

- Revisi ke X (kesepuluh) yaitu revisi pagu dari Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 18 Oktober 2023 dengan nilai pagu Rp40.565.083.000,-
 - Revisi ke XI (kesebelas) yaitu revisi POK dari Direktorat Jenderal Anggaran Tanggal 30 November 2023 dengan nilai pagu anggaran masih sama dengan pagu sebelumnya.
2. Pada Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung terdapat program Nasional (PN) sebesar Rp20.933.753.000,- yang terdiri dari :
- 1.1 Program sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat senilai Rp899.216.000,-
 - 1.2 Program calon induk unggul ikan laut dan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat senilai Rp3.555.314.000,-
 - 1.3 Program sarana bidang kemaritiman , kelautan dan Perikanan senilai Rp830.843.000,-
 - 1.4 Program bidang prasarana percontohan perbenihan komoditas unggulan senilai Rp800.000.000,-
 - 1.5 Program penyidikan dan Pengujian penyakit , Sampel Surveilen Resistensi Antimikroba senilai Rp75.468.000,-
 - 1.6 Program bidang kemaritiman peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan senilai Rp150.000.000,-
 - 1.7 Bantuan peralatan / sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat senilai Rp12.384.784.000,-
 - 1.8 Program prasarana produksi dan usaha yang dikembangkan senilai Rp1.050.000.000,-
 - 1.9 Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis senilai Rp688.128.000-

1.10. Prasarana pakan dan obat ikan yang dikembangkan senilai Rp500.000.000,-

3. Pada Tahun Anggaran 2023 ini, Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung mendapatkan pagu blokir senilai Rp7.383.624.000,- atau sebesar 18,87 %.

4. Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp67.166.150,- yang berupa :

a. Pengadaan perencanaan rehab Hatchery Modul I sebanyak 1 paket (2345.RBQ.004.052.A.533121) senilai Rp25.543.325,- dengan rekanan CV PANCA PERSADA dengan nomor kontrak 667/PPK/BBPBL/PL.424.III/2022 tanggal 07 Maret 2022 dan nomor BAST 801/PPK/BBPBL/PL.424/III/2022 tanggal 21 Maret.

b. Pengadaan perencanaan rehab Auditorium sebanyak 1 paket (2345.RBQ.004.052.A.533121) senilai Rp25.763.325,- dengan rekanan CV.R'LIMA KONSULTANT dengan nomor kontrak 672/PPK/BBPBL/PL.424/III/2022 tanggal 08 Maret 2022 dan nomor BAST 812/PPK/BBPBL/PL.424/III/2022 tanggal 22 Maret 2022

c. Pengadaan perencanaan pagar komplek 1 paket (2345.RBQ.004.052.A.533121) senilai Rp15.859.500,- dengan rekanan CV.PANCA PERSADA dengan nomor kontrak 692/PPK/BBPBL/PL.424/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan nomor BAST 834/PPK/BBPBL/PL.424/III/2022 tanggal 24 Maret 2022. Kontruksi dalam Pengerjaan tersebut akan dilakukan pengajuan usulan penghapusan dikarenakan ketidatersediaan anggaran pada tahun 2024.

5. Terdapat asset Barang Milik Negara yang dilelang dan masuk ke dalam pendapatan pemindahtanganan BMN senilai Rp36.200.623,- yaitu berupa jaringan distribusi tegangan 1 s.d 20 KVA yang berupa instalasi genset. Dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor B.2012/BBPBL/PL.510/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan nomor Risalah Lelang No 412/20/2023 tanggal 20 Juni 2023.

6. Terdapat ketidaksesuaian akun persediaan vs kode persediaan pada Semester II tahun 2023 yaitu berupa kesalahan pencatatan belanja barang akun 523121 yang bukan merupakan belanja barang persediaan dan tidak menambah nilai asset dan telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul persediaan pada Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung pada tanggal 31 Desember 2023 (daftar terlampir)

No.	Persediaan Tercatat (Kode Barang)	Keterangan
1.	Pencatatan belanja barang akun 523121 Pengerjaan jaringan air laut modul III (1010399999000219) senilai Rp89.221.800,- Dengan nomor kontrak 2959/PPK/BBPBL/PL.424/X/2023	Kesalahan catat belanja barang
2.	Pencatatan belanja barang akun 523121 Pengerjaan Pemeliharaan alat dan mesin ras (1010399999000220) senilai Rp90.938.970,- Dengan nomor kontrak 3066/PPK/BBPBL/PL.424/X/2023	Kesalahan catat belanja barang

Setelah mempertimbangkan data dukung yang melekat pada Persediaan tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada Aplikasi SAKTI Modul Persediaan sebagai berikut:

No.	Persediaan Tercatat semula	Perbaikan Yang dilakukan
1.	Pencatatan dalam persediaan (1010399999000219) senilai Rp89.221.800,- senilai Pada Modul persediaan	Penghapusan transaksi lainnya pada modul persediaan
2	Pencatatan belanja barang akun 523121 Pengerjaan Pemeliharaan alat dan mesin ras (1010399999000220) senilai Rp90.938.970,- pada modul persediaan	Penghapusan transaksi lainnya pada modul persediaan

7. Terdapat penerimaan kembali belanja modal TAYL senilai Rp2.604.056,- yaitu adalah tindak lanjut audit Kinerja Itjen No.T.326/ITJ/HP.110/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 ,yaitu terdapat temuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan berupa kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan atas kelebihan bayar CV.Ciano Nur Niaga dan sudah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan nomor NTPN 0C3BF3C1FBFKIIMD tanggal 27 Nopember 2023.

8. Setoran sisa GUP/TUP telah di setor ke kas negara senilai Rp34.420,- di setor pada tanggal 18 Desember 2023 dengan kode NTPN 90D9C1GC7POCPVGL.

9. Terdapat Utang pada pihak ketiga yaitu adalah berupa tagihan listrik PLN bulan Desember 2023 senilai Rp Rp157.542.638,- dan belanja pegawai yang masih harus di bayar berupa uang makan pegawai bulan Desember 2023 sebesar Rp19.824.000,- (untuk 9 hari) akan dibayarkan pada bulan Januari 2024 lewat LS pegawai sedangkan untuk uang makan yang sudah dibayarkan di bulan Desember 2023 sebesar Rp21.583.000,- (10 hari) dibayarkan melalui GUP Nihil.

10. Terdapat perbedaan antara pendapatan LO (Laporan operasional) dengan pendapatan di LRA (Laporan Realisasi Anggaran) senilai Rp50.272.122,- perbedaan tersebut berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp6.911.888,- , penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar Rp2.604.056,dan pendapatan pemindahtanganan BMN senilai Rp.40.756.178,-

11. Terdapat perbedaan nilai realisasi belanja pegawai di LRA dan LO yaitu selisih Rp19.824.000,- , hal itu dikarenakan karena ada uang makan pegawai bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan , sehingga mengakibatkan perbedaan di jumlah realisasinya.

12. BBPBL Lampung terdapat koreksi BPK yaitu Temuan Hewan dan tanaman tanaman dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 40.244.680.563,-

12. Berdasarkan Keputusan Kepala BBPBL Lampung dengan Nomor: 0057/BBPBL/OT.213.K/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Mulyanto, S.T,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Sunaryat, SP.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Eko Priyanto, SP. MM.
Bendahara Pengeluaran	: Yohana Florensia Corne